
KEARIFAN LOKAL DALAM PENCITRAAN INSTITUSI BERBASIS KINERJA

Teguh Ratmanto

Masyarakat dan Media Massa

Seiring dengan munculnya era informasi sekarang ini, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, maka terjadi pula pergeseran proses kognitif masyarakat. Media massa (cetak, elektronik, dan Internet) telah menjadi alat utama dalam pemahaman masyarakat tentang realitas. Media massa memiliki kemampuan untuk membangun pencitraan dalam benak masyarakat serta membentuk pendapat mereka. Media melalui isi pesan melaksanakan strategi pembingkai, yang menyoroti aspek-aspek tertentu dan mengabaikan aspek-aspek lain dalam memandang kenyataan. Kondisi masyarakat sekarang ini dengan tepat dijelaskan oleh Ellul, “Kalau kita ingin menggambarkan zaman ini, maka gambaran yang terbaik untuk dijelaskan mengenai suatu realitas masyarakat, adalah masyarakat dengan sistem teknologi yang baik atau masyarakat teknologi.” (Ellul dalam Bungin, 2008:121)

Media yang berorientasi pada profit akan memanfaatkan setiap potensi yang dimilikinya untuk meraih laba sebesar-besarnya, oleh karena itu, isi media massa seperti ini akan cenderung pada isu yang digemari masyarakat dengan indikator yang digunakannya adalah rating. Strategi media diimplementasikan secara halus agar tidak disadari oleh khalayak sehingga pada umumnya masyarakat tidak sadar sedang dipengaruhi oleh media massa, terutama televisi. Dalam kaitan dengan pengaruh televisi, (Bungin, 2008:121) menyebutkan, “Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah mengusai jalan pikiran masyarakat dengan apa yang diistilahkan dengan *theatre of mind*.”

Media massa menurut Laswell di dalam masyarakat, memiliki dua fungsi utama yaitu, pengawasan sosial dan korelasi (pertautan). Fungsi pengawasan sosial merujuk pada upaya penyebaran

informasi dan interpretasi yang obyektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi pengawasan juga mencakup berita menyediakan media yang sangat penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat seperti laporan pasar saham, laporan tentang kondisi jalan, dan lain-lain. Fungsi pengawasan juga dapat menyebabkan beberapa disfungsi dimana disfungsi ini terjadi ketika individu jatuh ke dalam keadaan apatis atau pasif sebagai akibat terlalu banyak informasi. Fungsi korelasi sosial merujuk pada upaya pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus. Fungsi sosialisasi merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya dan untuk menegakkan norma-norma sosial. Dalam menjalankan fungsi komunikasi massa, institusi media massa menjalankan peran mediasi atau penghubung. Dalam hal ini, McQuail (1994:53) menyebutkan peran media massa sebagai berikut:

1. *Jendela* pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar diri kita, tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak.
2. *Juru bahasa* yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas.
3. *Pembawa atau penghantar* informasi dan pendapat.
4. *Jaringan interaktif* yang menghubungkan pengirim dengan penerima melalui berbagai macam umpan balik.
5. *Papan penunjuk jalan* yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau intruksi.
6. *Penyaring* yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan sistematis atau tidak.

7. *Cermin* yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri; biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan (*distorsi*) karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat oleh para anggota masyarakat, atau seringkali pula segi yang ingin mereka hakimi atau cela.
8. *Tirai atau penutup* yang menutupi kebenaran demi pencapaian tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan (*escapism*).

Masyarakat modern sekarang ini adalah masyarakat yang sangat bergantung pada media (*media based society*). Oleh karena itu, keterampilan dalam menggunakan media merupakan suatu hal yang sangat penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Secara teoritis, realitas yang ditampilkan oleh media adalah realitas kedua (*second hand reality*), yaitu realitas yang telah terseleksi. Di sini proses pencitraan menjadi sangat penting. Tetapi, pada perkembangan selanjutnya, jargon pencitraan yang pada awalnya merupakan istilah yang netral untuk memperkenalkan tokoh maupun lembaga mulai mengalami degradasi sehingga sering dianggap sebagai upaya manipulatif untuk mempengaruhi opini publik. Media massa sekarang ini telah menciptakan suatu dunia hasil konstruksi yang tidak lagi menggambarkan realitas yang sebenarnya.

Penciptaan dunia kebudayaan (realitas) dewasa ini mengikuti satu model produksi yang disebutnya simulasi –penciptaan model-model nyata yang tanpa asal usul atau realitas: hiperealitas. Melalui model simulasi, manusia dijebak dalam satu ruang, yang disadarinya sebagai nyata, meskipun sesungguhnya semu atau khayalan belaka. (Baudrillard dalam Piliang, 1998:280)

Salah satu kemampuan media dalam menciptakan realitas semu adalah dengan menciptakan apa yang Daniel Boorstin telah disebut sebagai "pseudo-event" dimana media untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu telah menciptakan suatu "peristiwa" yang sengaja

dibuat-buat untuk memperoleh liputan media, sehingga media massa meliputnya sedemikian rupa padahal “peristiwa” yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Media massa berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi, nilai, dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat sehingga, dalam hal ini media massa dapat berfungsi untuk meningkatkan kohesi sosial dan membantu integrasi individu ke dalam masyarakat melalui proses sosialisasi. Namun, karena sifat impersonalnya media massa memiliki potensi untuk mengubah masyarakat melalui proses depersonalization yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat massa (disfungsi media). Disfungsi media ini juga telah mengakibatkan berkurangnya berbagai subkultur dan membantu meningkatnya masyarakat massa. Hal ini disebabkan karena karena media massa kita cenderung untuk berbicara, berpikir, dan bertindak, serta bereaksi dengan cara yang sama.

Dalam masyarakat modern saat ini, kebanyakan gambaran kehidupan kita berasal dari media massa. Masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat modern dimulai dengan bergantung pada media massa. Kontribusi media massa dalam hal substansi adalah memberikan berbagai macam informasi yang tersedia untuk pembangunan masyarakat. Media memperluas wawasan, membantu membangun empati, memfokuskan perhatian pada suatu masalah dan tujuan pembangunan. Seluruh hal-hal ini dapat dilakukan secara langsung dan melalui penciptaan iklim informasi yang menstimulasi pembangunan. Oleh karena itu, media massa memiliki kemampuan untuk mencerdaskan masyarakatnya. Namun juga sebaliknya, media massa juga dapat mengarahkan masyarakat menuju kesadaran palsu yang mengalihkannya dari realitas yang sebenarnya.

Reformasi Birokrasi dan Kearifan Lokal

Seiring dengan dimulainya gerakan *Reformasi Birokrasi* yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 istilah reformasi birokrasi semakin menguat, dimana ia didefinisikan sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan

tata kelola pemerintahan Indonesia. Upaya besar ini bertujuan untuk mengubah kultur birokrasi di Indonesia dari *abdi negara* menjadi *abdi masyarakat*. Pada masa Orde Baru, terminologi *abdi negara* diterjemahkan menjadi abdi pemerintah sehingga fungsi abdi masyarakatnya terabaikan. Kondisi ini telah memunculkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fenomena ketidakpercayaan terhadap masyarakat pemerintah ini juga terjadi di Negara lain. The three most economically (and democratically) developed countries, Japan, Korea, and Taiwan, all have extremely low levels of trust; for example, only 14% of Japanese, 15% of Koreans, and 23% of Taiwanese trust their parliament (“a great deal” or “quite a lot”) (Diamond, 2007). Lebih lanjut, Diamond menyebutkan bahwa pemerintah dapat meraih kembali kepercayaan rakyat yang telah hilang, tetapi pemerintah harus melakukan karya yang nyata bukan hanya wacana.

To build public trust in government, government must govern better: more transparently, responsibly, accountably, and responsively, with more active engagement with the public and in particular more rigorous respect for the law and the public interest. Nothing is more toxic to public trust in government than extensive (not to mention endemic) corruption (Diamond, 2007)

Lebih jauh Jefkin menyebutkan bahwa, “The distinction must be made between Government propaganda which aims to seek support for the Government and Information services which provide information of benefit to the people.” (Jefkin, 1982:79). Kesalahan yang selama ini terjadi adalah karena selama ini, *Public Administration* sering diartikan sebagai Administrasi Negara sehingga orientasi administrasi negara adalah bagaimana pelayanan kepada negara, dan masyarakat harus melayani negara, semuanya serba negara sehingga muncul istilah “abdi negara”. Sebenarnya konsep awal dari *Public Administration*, sesuai dengan artinya, yaitu “Administrasi Publik” sehingga harus berorientasi kepada pelayanan public atau masyarakat. Pada perkembangannya paradigma administrasi public kini mengarah dan berorientasi kepada masyarakat serta berupaya

bagaimana strategi melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (publik).

Birokrasi pemerintah yang ada selama ini tidak lagi sesuai untuk melayani masyarakat karena konsep birokrasi yang ada tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Dalam perspektif sejarah Birokrasi merupakan perubahan yang radikal dibandingkan dengan konsep feodalisme, tetapi sekarang kondisi masyarakat telah berubah sehingga birokrasi pun harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

But the bureaucratic model developed in condition very different from those we experience today. It developed in a slower-pace society, when change proceeded at a leisurely gait. It developed in an age of hierarchy, when only those at the top of the pyramid had enough information to make informed decisions. It developed in a society who worked with their hands, not their mind. (Osborne dan Gaebler, 1993:15)

Kini tuntutan perubahan birokrasi tampaknya telah menjadi sebuah kemestian dimana orientasi utamanya adalah pelayanan publik. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen dari pimpinan dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Perubahan signifikan pelayanan publik, akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Setiap penentuan kebijakan publik harus melibatkan publik karena, "Because government decisions and actions often affect more people and with greater consequences, communicating in government tends to be more important and often more difficult than communicating in business." (Garnett dalam Putra, 2004:116). Sementara itu,

The term public affairs increasingly is used to describe a specialty of area public relations that deals with community relations and government affairs ... it should be more narrowly defined as "corporate citizenship." Activities included in the term range from a donation to a local charity to the monitoring of social and political issues and lobbying for passage of favorable legislation. (Wilcox et.all, 1992:370)

Pada tataran inilah, kemajemukan budaya Indonesia dapat berperan dalam memberikan landasan filosofis dan kultural bagi proses perubahan birokrasi. Berkaitan dengan perubahan orientasi ini, Parmenter menyebutkan bahwa, "Kesuksesan utama dari perubahan strategi sangat bergantung pada bagaimana perubahan itu diperkenalkan dan diimplementasikan, dan bukan pada maksud baik dari strategi tersebut" (Parmenter, 2010:21). Di samping itu, ukuran keberhasilan seorang pemimpin harus berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. "Ada lima tujuan yang ingin dicapai melalui pengukuran, yaitu (1) menciptakan nilai (value), (2) memperbaiki apa yang dilakukan sebelumnya, (3) memberikan penghargaan dan memacu keberhasilan, (4) menemukan dan meluruskan kekeliruan, serta (5) mendemonstrasikan nilai" (Taylor, dalam Gozali, 2005:2)

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya, masyarakat Jawa, peranan pemimpin masih sangat besar dalam melakukan suatu perubahan sehingga pemimpin harus mampu memberikan contoh dan tauladan. Nilai kearifan lokal yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara, "*Ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tut wuri handayani*" dapat menjadi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam membangun proses pencitraan yang berbasis kinerja bukan berdasarkan pseudo event.

Indonesia memiliki konsep kepemimpinan atau manajemen yang berbasis kearifan lokal. Konsep kepemimpinan ini tidak selalu identik dengan posisi pimpinan yang selalu berada di atas, tetapi lebih merupakan filosofi dalam bertindak di dalam suatu organisasi sesuai dengan peran yang dimiliki karena tidak selalu berfokus pada aspek vertikal dan horizontal semata tetapi lebih aspek depan dan

belakang. Kearifan kepemimpinanpun yang dimaksud adalah konsep kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara.

Tugas utama seorang pemimpin sesungguhnya adalah mengulurkan tangan, dalam pengertian membuka hati dan pikiran, menyediakan waktu dan tenaga, untuk bekerja bagi orang yang dipimpinnnya. Bekerja dalam hal ini ialah menciptakan dan membangun harapan bersama, merumuskan cita-cita bersama, menetapkan tujuan, mengelola dan menentukan arah, mencari jalan keluar, mendorong, melindungi, dan seterusnya. Bagi para pemimpin pemerintahan, tentu saja uluran tangan dimaksud adalah untuk rakyat. Sikap itu seyogyanya dimulai dengan keterbukaan, ketiadaan prasangka apalagi kepentingan dari maksud baik, untuk merangkul sesama.

Ki Hajar Dewantara memiliki moto dalam bahasa jawa yang berbunyi: *Ing ngarso sung tulodho, ing madaya mangun karsa, tut wuri handayani*. Motto tersebut terjemahan langsungnya adalah “*di depan memberikan teladan, di tengah menggerakkan, di belakang memberikan dorongan*”. Berbeda dengan konsep kepemimpinan Barat yang lebih cenderung pada dikotomi memimpin dan pimpinan atau atasan dan bawahan, maka konsep kepimpinan Ki Hajar Dewantara ini lebih menekankan pada aspek peran seseorang dalam suatu organisasi.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memahami orang yang dipimpinnnya sehingga mereka dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Perbedaan stratifikas selayaknya menjadi faktor pembeda dalam suatu organisasi, tetapi lebih merupakan pembagian tugas. Pendekatan yang lebih manusiawi adalah dengan menghargai setiap manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu seorang pemimpin harus mampu menempatkan setiap orang dalam organisasi sesuai dengan kemampuan dan perannya, di samping itu ia juga dituntut untuk berperan sesuai dengan tempat dimana ia berada.

Ing ngarso sung tulodo. Prinsip ini berarti bahwa seorang pemimpin harus memberikan contoh bagi orang yang dipimpinnnya

karena posisinya yang di depan, maka ia akan dilihat oleh semua orang sehingga setiap kata-kata dan perbuatannya akan selalu dilihat dan dicatat oleh masyarakat dan bawahannya. Makna Ing Ngarso Sun Tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang - orang disekitarnya. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan. Dalam ajaran Ki Hajar yang pertama ini menggambarkan situasi dimana seorang pemimpin bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, namun juga harus menjadi teladan bagi orang - orang yang mengikutinya. Kata Ing Ngarso tidak dapat berdiri sendiri, jika tidak mendapatkan kalimat penjelas dibelakangnya. Artinya seorang yang berada di depan jika belum memberi teladan maka belum pantas menyandang gelar 'pemimpin' . Jika kita melihat kepemimpinan dari orang-orang dalam sejarah, maka dapat kita lihat betapa perbuatan sang pemimpin menjadi inspirasi bagi orang yang dipimpinya.

Ing madyo mbangun karso artinya ketika berada di tengah seorang pemimpin harus mampu memotivasi. Seorang pemimpin tidak selayaknya selalu memberikan perintah, tetapi juga memberikan motivasi dan dorongan bagi para bawahannya. Ing Madyo artinya di tengah-tengah, Mbangun berarti membangkitkan atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang pemimpin, meskipun ia sangat sibuk, ia harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat orang yang dipimpinya. Ajaran kedua ini sarat dengan makna kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Seorang pemimpin tidak hanya melihat kepada orang yang dipimpinya, melainkan ia juga harus berada di tengah - tengah orang yang dipimpinya. Merupakan hal yang tidak terpuji bila seorang pemimpin hanya diam dan tak berbuat apa - apa sedangkan orang yang dipimpinya menderita. Selain itu pemimpin harus kreatif dalam memimpin, sehingga orang yang dipimpinya mempunyai wawasan baru dalam bertindak. Di samping itu, seorang pemimpin juga harus melindungi semua orang yang dipimpinya.

Tut wuri handayani berarti bahwa seorang pemimpin juga harus memperhatikan bawahan yang berada di barisan paling

belakang. Karena bila seorang pemimpin selalu melihat kedepan dan melupakan maka bukan tidak mungkin barisan paling belakang akan ketinggalan dan tercecer sehingga barisan menjadi tidak utuh dan tujuan tidak tercapai. Tut Wuri artinya mengikuti dari belakang dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang disekitar kita menumbuhkan motivasi dan semangat. Adapun dorongan tersebut dapat berupa moral dan semangat kepada orang lain.

Kearifan lokal atau *Local wisdom* merupakan solusi mengatasi dinamika masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi dengan memberikan karakter yang terpuji, tidak mengumbar janji, tidak mementingkan diri atau kelompok, memberikan keteladanan, kehidupan yang beriman dan bertakwa yaitu kehidupan yang didasarkan pada atau dilandasi pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut secara konsisten dan konsekuen, bekal kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang komprehensif. Meskipun demikian, kepemimpinan yang berdasarkan kearifan lokal ini harus jelas dan terukur sehingga proses pencitraan yang terjadipun berbasiskan kinerja. Disinilah peran Humas pemerintah menjadi sangat penting.

Humas pemerintah ... mempunyai dua tugas: pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai; kedua, menerangkan dan mendidik public mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. (Effendy, 1986:48)

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M., 2008, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Medi Massa, Iklan Televisi dan Kepurusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*: Jakarta, Kencana.
- Diamond, Larry, 2007, *Building Trust in Government by Improving Governance*, Paper Presented to the 7th Global Forum on Reinventing Government: “*Building Trust in Government*” Sponsored by the United Nations Session V: Elections, Parliament, and Citizen Trust Vienna, June 27, 2007.
- Effenfy, Onong Uchjana, 1986, *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*: Bandung, Remadja Karya.
- Jefkins, Frank, 1982, *Public Relations: Made Simple*: London, Heinemann.
- Gozali, Dodi M, 2005, *Communication Measurement: Konsep dan Aplikasi Pengukuran Kinerja Public Relations*, Bandung: Simbiosis Rektama Media.
- McQuail, Dennis, 1994, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, edisi kedua, Jakarta: Erlangga
- Osborne, David dan Ted Gabler, 1993, *Reinventing Government: How the Enterpreneurial spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Parmenter, David, 2010, *Key Performance Indicators: Pengembangan, Implementasi, dan Penggunaan KPI terpilih*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Piliang, Yasraf Amir, 1998, *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*: Bandung, Mizan.
- Putra, I Gusti Ngurah, 2004, *Public Relations Pemerintah: Tantangan Baru dalam Alam*

Teguh Ratmanto

Demokratis, dalam *Koalisi Dominan: Refleksi Kritis atas Peran dan Fungsi Public Relations dalam Manajemen*, editors: Baik dan Sati: Jakarta, Perhumas.

Wilcox, Dennis L, et.all., 1992, *Public Relations: Strategies and Tactics*, third edition: New York, HarperCollin Publishers.

Teguh Ratmanto

081 321 970 120

teguh_ratman@yahoo.com